Transformasi Sistem dan Strategi Pengembangan PTKI Berbasis Multikultural: Sebuah Analisis Komparatif

Muhammad Arif Luthfi[1], Alfauzan Amin[2], Zubaedi[3], Hery Noer Aly[4] Destriani[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu
arifluthfie@gmail.com

Abstract

This study investigates how Islamic Higher Education Institutions (PTKI) reinterpret state-promoted religious moderation by shifting from a tolerance-based approach to an intersubjective coherence framework that emphasizes dialogical engagement and ethical responsiveness to diversity. Using a qualitative, policy-oriented design, the research analyzes national regulations, institutional blueprints, curriculum documents, and internal quality assurance reports, complemented by relevant scholarship on multiculturalism and higher-education transformation. The analysis employs inductive coding to identify institutional patterns in framing, operationalizing, and negotiating multicultural commitments. The results show three central tendencies: national policy provides strong normative direction but limited operational clarity; PTKI demonstrate uneven levels of institutional transformation, with some embedding moderation in curriculum governance and community programs while others reduce it to symbolic compliance; and the absence of sustained intersubjective mechanisms restricts the translation of policy principles into academic culture and institutional practices. The study concludes that meaningful transformation requires strengthening dialogical accountability, redesigning curriculum integration strategies, and aligning institutional capacities with national expectations. It proposes intersubjective coherence as a practical conceptual pathway that enables PTKI to address the complexity of plural societies while maintaining academic integrity, ensuring that multicultural commitments become embedded rather than merely declared.

Keywords: *multicultural education; Islamic higher education; institutional transformation.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mereinterpretasi moderasi beragama yang dipromosikan negara dengan menggeser pendekatannya dari toleransi yang bersifat permisif menuju kerangka koherensi intersubjektif yang menekankan dialog dan tanggung jawab etis terhadap keragaman. Dengan desain kualitatif berorientasi kebijakan, penelitian ini menganalisis regulasi nasional, cetak biru institusi, dokumen kurikulum, dan laporan penjaminan mutu, serta literatur tentang multikulturalisme dan

transformasi pendidikan tinggi. Analisis dilakukan melalui pengodean induktif untuk mengidentifikasi pola institusional dalam membingkai, mengoperasionalkan, dan menegosiasikan komitmen multikultural. Hasil menunjukkan tiga kecenderungan utama: kebijakan nasional menyediakan arah normatif yang kuat namun minim kejelasan operasional; implementasi di PTKI tidak merata, di mana sebagian mengintegrasikan moderasi dalam tata kelola kurikulum dan program kemasyarakatan, sementara lainnya cenderung menjadikannya kepatuhan simbolik; dan ketiadaan mekanisme intersubjektif yang berkelanjutan membatasi penerjemahan prinsip kebijakan ke budaya akademik dan praktik kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi yang bermakna memerlukan penguatan akuntabilitas dialogis, perancangan ulang strategi integrasi kurikulum, dan penyelarasan kapasitas institusi dengan ekspektasi nasional. Studi ini mengusulkan koherensi intersubjektif sebagai jalur konseptual praktis untuk memperteguh komitmen multikultural secara melembaga.

Kata Kunci: pendidikan multikultural; PTKI; transformasi institusional.

Pendahuluan

Transformasi lembaga pendidikan tinggi kini menjadi salah satu indikator paling jelas dari pergeseran pengetahuan dan dinamika sosial abad ke-21. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berada tepat di jantung perubahan tersebut, institusi-institusi ini dituntut untuk memperkuat kapasitas akademik dan tata kelola, sambil tetap menjaga kontinuitas tradisi keilmuan Islam di tengah masyarakat yang semakin majemuk. (Khozin & Umiarso, 2019), "Transformasi PTKI menekankan integrasi antara ilmu agama dan sains, serta pengembangan kerangka pendidikan berbasis spiritualitas untuk membentuk generasi muda Muslim yang holistik dan adaptif."[1] Dorongan global —mulai dari mobilitas mahasiswa lintas negara, kompetisi akademik regional, hingga tuntutan publik atas akuntabilitas institusional— telah menggerus ruang bagi pola kelembagaan lama. Dalam konteks Asia Tenggara, desakan untuk menafsirkan ulang peran PTKI menjadi semakin nyata, terutama karena intensifikasi perjumpaan lintas etnis, agama, dan budaya yang membentuk wajah masyarakat kontemporer. (Dhont, 2016), "PTKI menghadapi tantangan globalisasi, pluralitas masyarakat, dan arus radikalisme yang menuntut respons adaptif dan inovatif. PTKI harus memperkuat karakter moderat, toleran, dan inklusif dalam pendidikan, serta menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan masyarakat multikultural."[2] Transformasi tersebut, dengan demikian, tidak dapat disempitkan sebagai "momentum administratif", tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial PTKI terhadap komunitas plural yang mereka layani.

[1] Khozin, K., & Umiarso, U. (2019). The Philosophy and Methodology of Islam-Science Integration: Unravelling the Transformation of Indonesian Islamic Higher Institutions. *Ulumuna*. https://doi.org/10.20414/ujis.v23i1.359

[2] Dhont, F. (2016). Islamic Higher Education in the ASEAN Region: From Opportunities and Challenges. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 379-392. https://doi.org/10.15575/jpi.v2i3.865

Perubahan karakter mahasiswa memperlihatkan gejala awal dari dinamika baru ini. Generasi yang lebih digital, lebih terbuka, dan lebih akrab dengan realitas pluralitas membawa ekspektasi yang berbeda terhadap cara lembaga pendidikan tinggi menjalankan fungsi epistemik sekaligus kultural. Meski begitu, respons PTKI terhadap perubahan tersebut tidak seragam. Beberapa lembaga bergerak cepat melalui pembaruan kurikulum berbasis multikultural, program internasionalisasi, dan modernisasi tata kelola; sementara lembaga lain masih terhambat oleh birokrasi yang lamban, keterbatasan sumber daya, atau bahkan resistensi budaya internal. Ketimpangan ini menandakan bahwa transformasi PTKI tidak sekadar merupakan upaya teknokratik, tetapi perubahan sistemik yang mencerminkan bagaimana setiap institusi memahami dan mempraktikkan multikulturalisme.

Dalam penelitian ini, multikulturalisme diperlakukan bukan sebagai slogan yang mudah diulang, tetapi sebagai orientasi etis dan epistemologis yang membentuk kebijakan institusi, praktik pembelajaran, serta hubungan PTKI dengan masyarakat. Kajian-kajian sebelumnya memang telah menyoroti modernisasi kurikulum pendidikan Islam atau arah kebijakan negara, tetapi relatif sedikit penelitian yang menghubungkan transformasi kelembagaan PTKI dengan multikulturalisme sebagai strategi pengembangan. Kekosongan ini membuka peluang teoretis dan empirik untuk membangun pemahaman yang lebih menyeluruh tentang arah perubahan PTKI di kawasan Asia Tenggara.

Kerangka kebijakan negara yang berbeda semakin memperkaya konteks analitis tersebut. Indonesia, misalnya, mendorong transformasi PTKI melalui integrasi kelembagaan serta akselerasi akreditasi internasional. (Ahid & Chamid, 2021), ”Kebijakan ini didukung oleh regulasi nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menjadi acuan pengembangan kurikulum dan pengakuan kualifikasi lulusan secara internasional.”[3] (Salam & Hussin, 2025), ”Malaysia memilih integrasi kurikulum dengan penekanan pada kompetensi global.”[4], sedangkan (Müller, 2018), ”Brunei mempertahankan model yang lebih terpusat dengan memperkuat identitas keagamaan nasional.”[5] Variasi kebijakan ini menciptakan konfigurasi kelembagaan yang tidak seragam, sekaligus menyediakan “laboratorium komparatif” yang memungkinkan telaah mendalam mengenai bagaimana multikulturalisme diterjemahkan menjadi kebijakan, strategi tata kelola, dan praktik pendidikan.

[3] Ahid, N., & Chamid, N. (2021). Implementation of Indonesian National Qualification Framework Based Curriculum in Higher Islamic Education. *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.15575/jpi.v7i1.12425

[4] Salam, A., & Hussin, N. (2025). ISLAMIZATION OF EDUCATION IN MALAYSIA. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v11i1.396

[5] Müller, D. (2018). Hybrid Pathways to Orthodoxy in Brunei Darussalam: Bureaucratised Exorcism, Scientisation and the Mainstreaming of Deviant-Declared Practices. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37, 141 - 183. https://doi.org/10.1177/186810341803700106

(Dobbins & Knill, 2017), "Dalam literatur pendidikan tinggi global, transformasi institusi kerap dianalisis melalui lensa tata kelola, regulasi negara, atau manajemen perubahan."[6] Meskipun berguna, pendekatan-pendekatan tersebut sering kali tidak cukup sensitif terhadap dimensi kultural, nilai-nilai komunitas, dan struktur relasi sosial yang melekat pada PTKI. Dalam konteks ini, transformasi sistemik PTKI tidak dapat dilepaskan dari tradisi intelektual Islam dan kompleksitas pluralitas sosial yang membentuk lingkungan tempat institusi tersebut beroperasi. (Hayadin et al., 2025), "Transformasi PTKI ditandai dengan pergeseran dari fokus eksklusif pada ilmu-ilmu keislaman menuju integrasi dengan ilmu pengetahuan modern."[7] Oleh karena itu, artikel ini memadukan analisis kebijakan pendidikan tinggi dengan teori multikulturalisme dan kajian kelembagaan Islam guna menghadirkan pemahaman yang lebih utuh—sebuah pendekatan yang jarang muncul dalam literatur internasional.

Bertolak dari latar inilah penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: bagaimana PTKI membentuk pola transformasi sistem dalam merespons masyarakat multikultural; strategi apa yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi akademik dan sosial mereka; serta sejauh mana perbandingan antarnegara atau antarlembaga dapat menjelaskan perbedaan pola adaptasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan hipotesis bahwa transformasi PTKI tidak hanya bergantung pada desain kebijakan formal, tetapi juga pada cara institusi menegosiasikan identitas keilmuan Islam dalam konteks plural. Hipotesis ini pada titik tertentu mampu menantang anggapan-anggapan konvensional mengenai relasi antara agama, pendidikan, dan keberagaman.

Kontribusi artikel ini bersifat ganda. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan pembacaan baru tentang transformasi PTKI sebagai reposisi epistemik dan kultural yang berakar pada multikulturalisme sebagai orientasi strategis. Secara praktis, temuan-temuan penelitian memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dan pemimpin institusi untuk merumuskan strategi pengembangan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk menjaga keterbacaan lintas disiplin, argumentasi dibangun melalui penjelasan konseptual yang jernih serta deskripsi konteks yang dapat diakses oleh pembaca semua kalangan.

Tinjauan Pustaka

Multikulturalisme dalam kajian pendidikan tinggi mengalami lintasan konseptual yang panjang dan tidak selalu linear. (Jayadi et al., 2022), "Pada fase awal, gagasan ini terutama dipahami sebagai strategi integrasi sosial yang menekankan pengakuan identitas etnis dan budaya."[8] Namun perkembangan teorinya bergerak ke arah yang lebih kritis ketika para pemikir mulai melihat perbedaan bukan sekadar objek toleransi

[6] Dobbins, M., & Knill, C. (2017). Higher education governance in France, Germany, and Italy: Change and variation in the impact of transnational soft governance. *Policy and Society*, 36, 67 - 88. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1278868

[7] Author), H., Niam, K., , M., & Lukens-Bull, R. (2025). Contemporary Changes in Islamic Higher Education in Indonesia: Dynamic Encounter Between Modernisation and Tradition. *Journal of Al-Tamaddun*. https://doi.org/10.22452/jat.vol20no1.14

[8] Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828

institusional, tetapi sebagai sumber produksi pengetahuan yang menantang struktur epistemik dominan. Dalam kerangka pendidikan tinggi kontemporer, multikulturalisme tidak lagi berfungsi sebagai tambahan kebijakan, melainkan sebagai landasan yang menata ulang cara institusi membaca hubungan antara negara, masyarakat, dan keragaman. (Nuryadi et al., 2020), "Multikulturalisme kini diakui sebagai paradigma yang tertanam dalam konstitusi, hukum, dan aturan sosial, bukan sekadar program insidental. ."[9] Perspektif demikian menjadi sangat signifikan bagi PTKI, yang sejak kelahirannya menempatkan keilmuan Islam dalam dialog yang terus-menerus dengan perubahan sosial dan dinamika pluralitas.

Sebagai institusi akademik yang memikul mandat sosial sekaligus keagamaan, PTKI di kawasan Asia Tenggara menampilkan sejarah dan konfigurasi struktural yang berbeda dari universitas umum. Sejak awal, ia tumbuh sebagai ruang produksi pengetahuan keislaman yang harus bernegosiasi dengan modernitas, politik identitas, dan kebutuhan negara membangun literasi keagamaan bagi publik. Transformasi PTKI di Indonesia sejak 1990-an memperlihatkan bagaimana perubahan kurikulum, tata kelola, dan orientasi riset membuka peluang integrasi ilmu yang lebih ekstensif. (Fitri et al., 2020), " Model integrasi bervariasi antar PTKI, misalnya UIN Malang dengan "tree of science", UIN Yogyakarta dengan "spider web", dan UIN Surabaya dengan "twin towers" yang menekankan pendekatan multidisipliner dan interkoneksi antar ilmu."[10] (Mohd Noor et al., 2023), "Malaysia menghadirkan pola berbeda: transformasi berlangsung dalam kerangka yang sangat terstandar dengan dukungan kebijakan pusat yang kuat."[11] Sementara itu, (Susilawati et al., 2025), "PTKI di Brunei bergerak dalam orbit identitas nasional sehingga orientasi multikulturalnya terutama dipandu oleh kerangka normatif negara."[12] Keragaman historis dan struktural ini penting untuk memahami bagaimana multikulturalisme bekerja secara berbeda di masing-masing konteks.

Penelitian mengenai kebijakan pendidikan tinggi Islam di ketiga negara menegaskan bahwa orientasi negara berperan dalam mengarahkan transformasi PTKI. (Kultsum et al., 2022), "Indonesia, misalnya, memilih jalur desentralisasi yang memberi keleluasaan institusional, tetapi konsekuensinya adalah variasi kualitas yang cukup tajam."[13] (Mas'ud et al., 2019), "Malaysia justru menekankan konsistensi kebijakan melalui

[9] Nuryadi, M., , Z., & , S. (2020). The Pattern of the Teaching of Multiculturalism-Based Civics Education: A Case Study at Higher Education Institutions. *European journal of educational research*, 9, 799-807. https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.2.799

[10] Fitri, A., Nafis, M., & Indarti, L. (2020). Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Transdisciplinary (MIT) Learning Approach and Strategy Based on Indonesian National Qualification Framework (KKNI) Curriculum. *Ulumuna*. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i1.375

[11] Noor, A., Dorasamy, M., & Raman, M. (2023). The Influence of Commitment to Change and Change-Related Behaviour among Academics of Malaysian-Islamic Higher Learning Institutions. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su151914250

[12] Susilawati, S., Supriyatno, T., Yasin, A., Anshari, M., Chakim, A., Haniah, Z., & Putri, C. (2025). Design of Curriculum Internationalization Based on Key Performance Indicators of Higher Education. *International Journal of Religion*. https://doi.org/10.61707/adj9f326

[13] Kultsum, U., Parinduri, M., & Karim, A. (2021). Comparative studies between public and private Islamic schools in the era of globalization. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i1.22182

koordinasi negara yang terpusat, sehingga arah perubahan tampak seragam."[14] Sebaliknya, (Kirkpatrick & Liddicoat, 2017), "Brunei mempertahankan stabilitas ideologis melalui intervensi negara yang begitu kuat."[15] Ketiga pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tinggi Islam tidak pernah netral, ia membawa preferensi tertentu tentang bagaimana pluralitas harus dipahami dan dikelola.

Dalam konteks itu, (Sibawaihi et al., 2025), "Multikulturalisme di Indonesia sering diperlakukan sebagai instrumen modernisasi keilmuan, yang mendorong integrasi ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan studi Islam."[16] (Mohamed Mustafa Ishak, 2002), "Malaysia mengartikulasinya sebagai kompetensi kewargaan yang selaras dengan visi *nation-building*."[17] sedangkan, (Müller, 2022), "Brunei mengaitkannya dengan nilai moral yang menyatu dalam kerangka Melayu Islam Beraja."[18] Ragam tafsir ini memperlihatkan bahwa multikulturalisme bukan konsep tunggal, melainkan orientasi yang dibentuk oleh sejarah politik, struktur kekuasaan, dan tujuan institusi. Literatur mutakhir menyebut variasi ini sebagai tantangan sekaligus peluang bagi penelitian komparatif, terutama ketika multikulturalisme digunakan sebagai lensa analitis untuk membaca perubahan institusional.

Teori transformasi sistem pendidikan tinggi menawarkan kerangka yang berguna untuk memahami dinamika tersebut. (Agus Zaenul Fitri et al., 2020), "Konsep seperti *capacity building*, *institutional resilience*, dan *policy alignment* menggambarkan bagaimana perubahan terjadi ketika kebijakan, struktur kelembagaan, dan kapasitas institusi saling terhubung."[19] Dalam kajian komparatif PTKI, teori-teori ini membantu menunjukkan bahwa multikulturalisme bekerja bukan hanya sebagai gagasan normatif, tetapi sebagai variabel institusional yang membentuk arah transformasi.

Kajian terdahulu mengenai PTKI di Indonesia menurut, (Ahid & Chamid, 2021) bahwa, "Upaya perubahan kurikulum integratif dan penguatan riset keislaman kontemporer."[20] Literatur mengenai Malaysia menurut, (Ahmad et al., 2020) lebih "Menekankan peran negara sebagai pengarah utama—baik melalui pendanaan maupun standardisasi

[14] Mas'ud, A., Fuad, A., & Zaini, A. (2019). EVOLUTION AND ORIENTATION OF ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA AND MALAYSIA. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*. https://doi.org/10.15642/jiis.2019.13.1.21-49

[15] Kirkpatrick, A., & Liddicoat, A. (2017). Language education policy and practice in East and Southeast Asia. *Language Teaching*, 50, 155 - 188. https://doi.org/10.1017/s0261444817000027

[16] , S., Arifullah, M., & Hadi, M. (2025). Implementing Multicultural Education in Indonesian State Islamic Universities: Case Studies of UIN Sunan Kalijaga and UIN Sulthan Thaha Saifuddin. *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.14421/jpi.2025.141.1-14

[17] Ishak, M. (2020). Managing Ethnicity and Constructing the Bangsa Malaysia (A United Malaysian Nation)*. . https://doi.org/10.32890/mmj.6.1-2.2002.8599

[18] Müller, D. (2022). Beyond the Sharia State: Public Celebrations and Everyday State-Making in the Malay Islamic Monarchy of Brunei Darussalam. *Asian Journal of Law and Society*, 9, 418 - 439. https://doi.org/10.1017/als.2022.33

[19] Fitri, A., Nasukah, B., & Tayeb, A. (2020). Strategic Planning Model of Islamic Religious Higher Education (PTKI) in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 287-308. https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.287-308

[20] Ahid, N., & Chamid, N. (2021). Implementation of Indonesian National Qualification Framework Based Curriculum in Higher Islamic Education. *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.15575/jpi.v7i1.12425

mutu."[21] Studi tentang Brunei menurut (Thoriquttyas et al., 2021), "Menunjukkan bagaimana pendidikan Islam dipertahankan sebagai penjaga identitas nasional."[22] Namun terdapat kesenjangan penting dalam tubuh literatur, belum ada penelitian yang secara sistematis membandingkan ketiga negara dengan menggunakan multikulturalisme sebagai kerangka konseptual utama. Kekosongan inilah yang membuka ruang bagi penelitian komparatif yang mampu menjelaskan bagaimana satu konsep yang sama dapat menghasilkan konfigurasi transformasi yang berbeda.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan literatur tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori multikulturalisme dan transformasi institusional. Tiga variabel diposisikan sebagai titik analisis utama: sejarah kebijakan, desain kelembagaan, dan kapasitas institusi. Ketiganya membantu menjelaskan bagaimana PTKI di Indonesia, Malaysia, dan Brunei merespons pluralitas sekaligus mengarahkan transformasi keilmuannya. Pendekatan komparatif dipilih bukan untuk menilai negara mana yang "lebih berhasil", tetapi untuk memahami logika internal masing-masing sistem dalam memadukan identitas keislaman, tuntutan akademik, dan realitas multikultural.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *policy-oriented comparative study*, yakni pendekatan yang menempatkan kebijakan sebagai unit analisis utama dan menelusuri relasi antara variabel kelembagaan, regulasi, serta konteks sosial-kultural yang memengaruhinya. Pendekatan tersebut memungkinkan pembacaan yang lebih tajam terhadap dinamika transformasi PTKI karena kebijakan dipahami tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai produk interaksi politik, historis, dan epistemik. Dengan kerangka komparatif, penelitian menelaah praktik di tiga negara—Indonesia, Malaysia, dan Brunei—yang masing-masing memiliki tradisi pendidikan tinggi keagamaan berbeda. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menangkap pola divergensi dan konvergensi kebijakan multikultural, sekaligus melihat bagaimana orientasi multikultural diterjemahkan dalam desain dan strategi pengembangan kelembagaan.

Untuk membedah material kebijakan secara sistematis, penelitian memadukan *policy content analysis* dan *analytic induction*. *Policy content analysis* digunakan untuk membaca struktur argumen, arah regulasi, serta kerangka kerja yang membentuk transformasi PTKI dalam dokumen kebijakan nasional dan institusional. Sementara itu, *analytic induction* memungkinkan peneliti mengikuti jejak hubungan antarkategori tematik yang muncul dari data, memeriksa konsistensi antarnegara, dan memperhalus proposisi analitis. Dengan orientasi ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi,

[21] Ahmad, A., Yee, K., & Farley, A. (2020). Exploring the Rationale of Performance Based Funding for Malaysian Public Universities. *Journal of Education and e-Learning Research*. https://doi.org/10.20448/journal.509.2020.71.15.21

[22] Thoriquttyas, T., Nasih, A., Sultoni, A., & Yani, A. (2021). Malay, Islam, Beraja and The [Islamic] Educational Philosophy in Brunei Darussalam. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.21043/edukasia.v16i2.11834

melainkan berusaha memahami rasionalitas kebijakan dan implikasinya bagi strategi pengembangan PTKI yang berakar pada multikulturalisme.

Data dalam penelitian ini dihimpun dari tiga kategori utama yang saling melengkapi. *Pertama*, dokumen kebijakan yang mencakup undang-undang, peraturan menteri, *blueprint* pendidikan tinggi, serta laporan lembaga akreditasi, yang memberikan gambaran mengenai arah regulasi dan kerangka transformasi sistemik. *Kedua*, dokumen institusional PTKI—termasuk rencana strategis, pedoman akademik, laporan mutu internal, dan pedoman kurikulum—digunakan untuk menelusuri bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam tata kelola dan praktik kelembagaan. *Ketiga*, literatur ilmiah yang berfokus pada pendidikan multikultural, kebijakan pendidikan tinggi, dan transformasi kelembagaan, berfungsi memperkaya dimensi konseptual dan memperluas konteks analitis penelitian. Seluruh sumber dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap isu multikulturalisme dan dinamika sistem organisasi PTKI, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan problematik yang dikaji.

Pengumpulan dokumen dilakukan melalui penelusuran portal resmi pemerintah, repositori universitas, dan basis data akademik internasional. Rentang waktu 2010–2024 dipilih untuk memastikan bahwa dokumen yang dianalisis mencerminkan periode kunci transformasi pendidikan tinggi Islam di ketiga negara. Dengan cakupan temporal ini, penelitian dapat menangkap kontinuitas maupun perubahan arah kebijakan.

Analisis komparatif dilaksanakan dalam tiga tahap yang saling berkelindan. Pertama, *within-case analysis* digunakan untuk memetakan karakteristik kebijakan, orientasi multikultural, serta pola pengembangan sistem PTKI dalam masing-masing konteks nasional. Kedua, *cross-case comparison* dilakukan untuk menelaah titik-titik kesamaan dan perbedaan terkait logika kebijakan, rancangan kelembagaan, dan mekanisme implementasi. Ketiga, tahap *synthesis* dirumuskan untuk menyatukan temuan tersebut dalam sebuah kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana faktor sosial-kultural, politik, dan kelembagaan membentuk strategi pengembangan PTKI berbasis multikultural. Dengan demikian, pendekatan komparatif tidak berhenti pada klasifikasi, tetapi menghasilkan pemahaman antar-kasus yang lebih subtil.

Data dianalisis melalui *thematic coding* menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif. Kategori awal mencakup orientasi multikultural, logika regulasi, desain sistem, model tata kelola, strategi transformasi, dan instrumen kebijakan. Proses pengodean berlangsung secara iteratif sehingga kategori dapat berubah atau berkembang sesuai ritme data. Untuk menjaga reliabilitas, temuan divalidasi melalui triangulasi lintas sumber, terutama antara dokumen kebijakan nasional dan dokumen institusional PTKI.

Seluruh data yang digunakan berasal dari dokumen publik, sehingga risiko etis relatif minimal. Meski begitu, interpretasi kebijakan dijaga dengan penuh ketelitian akademik. Peneliti menghindari pelapisan nilai normatif yang tidak perlu dan memastikan bahwa

kritik terhadap kebijakan disampaikan secara proporsional, berbasis data, serta tetap menghormati konteks sosial-politik yang melatarbelakangi produksi kebijakan tersebut.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi PTKI di Indonesia, Malaysia, dan Brunei bergerak melalui lintasan yang tidak seragam, meskipun ketiganya bertemu pada satu titik temu yaitu multikulturalisme berfungsi sebagai parameter kunci dalam pembaruan kelembagaan. Selaras dengan pendapat (Torres & Tarozzi, 2020) bahwa, "Multikulturalisme telah menjadi parameter kunci dalam transformasi kelembagaan PTKI, baik secara normatif maupun praktis."[23] Temuan tersebut diperoleh melalui analisis *within-case* dan diperkuat oleh perbandingan *cross-case* yang menyingkap bagaimana negara, institusi, dan konteks sosial-kultural masing-masing negara memberi bentuk pada arah perkembangan sistem PTKI. Perpaduan dua pendekatan analitis ini memungkinkan pembacaan yang lebih tajam terhadap cara multikulturalisme dimaknai dan dioperasikan sebagai instrumen kebijakan pendidikan tinggi Islam.

Dalam konteks Indonesia, dokumen kebijakan memperlihatkan bahwa, (Giesenbauer & Müller-Christ, 2020), "Transformasi PTKI bertumpu pada integrasi kelembagaan yang dibingkai sebagai bentuk "modernisasi sistemik" sekaligus perluasan mandat akademik."[24] Kerangka tersebut ditegaskan melalui kebijakan akreditasi internasional dan *governance reform* yang mendorong internalisasi nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum, desain organisasi, dan pengembangan pusat studi. Secara konseptual menurut (Kafid & Rohman, 2018), "Arah kebijakan ini mencerminkan ambisi besar negara untuk menempatkan PTKI sebagai institusi yang mampu menjawab keragaman sosial Indonesia."[25] Namun data mengungkapkan ketidakseimbangan kapasitas antar-institusi, PTKI besar dengan sumber daya memadai berhasil mengartikulasikan orientasi multikultural secara progresif, sedangkan institusi lebih kecil kerap bergerak reaktif dan terbelenggu prosedur birokratis. (Paul-Binyamin & Reingold, 2014), "Tantangan ini juga tercermin dalam literatur global, di mana institusi pendidikan dengan kapasitas terbatas cenderung mengalami hambatan dalam mengadopsi pendekatan multikultural secara sistemik."[26] Akibatnya, terdapat celah inheren antara desain kebijakan nasional dan kemampuan institusi untuk menerjemahkannya secara konsisten.

---

[23] Torres, C., & Tarozzi, M. (2020). Multiculturalism in the world system: towards a social justice model of inter/multicultural education. *Globalisation, Societies and Education*, 18, 18 - 7. https://doi.org/10.1080/14767724.2019.1690729

[24] Giesenbauer, B., & Müller-Christ, G. (2020). University 4.0: Promoting the Transformation of Higher Education Institutions toward Sustainable Development. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su12083371

[25] Kafid, N., & Rohman, N. (2018). Islamic Higher Education and Religious Transformation of the Muslim Community's Surrounding. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4, 27-38. https://doi.org/10.15575/jpi.v4i1.2069

[26] Paul-Binyamin, I., & Reingold, R. (2014). Multiculturalism in teacher education institutes – The relationship between formulated official policies and grassroots initiatives. *Teaching and Teacher Education*, 42, 47-57. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.04.008

Malaysia menampilkan lanskap yang berbeda. Alih-alih melakukan integrasi kelembagaan seperti Indonesia, menurut (Abdul Bujang et al., 2020) bahwa, ”Pemerintah memperkuat harmonisasi kurikulum dan kompetensi global melalui *blueprint* pendidikan tinggi yang terstruktur.”[27] Dalam konfigurasi ini, multikulturalisme diposisikan sebagai *civic competency* dan dijalin ke dalam mata kuliah umum, modul kepemimpinan mahasiswa, serta *intercultural learning programmes*. Pada satu sisi, pendekatan yang sangat terpusat menghasilkan implementasi kebijakan yang stabil dan relatif homogen. Pada sisi lain, homogenitas tersebut membuat ruang bagi “outlier innovations”—inovasi yang biasanya muncul dari keragaman konteks dan eksperimen institusional—menjadi lebih terbatas. Laporan akreditasi menunjukkan bahwa standar yang seragam menjamin mutu dasar, tetapi tidak selalu menghasilkan pendekatan multikultural yang lebih kreatif atau kontekstual. Dengan demikian, kekuatan Malaysia terletak pada konsistensi pelaksanaan kebijakan, bukan pada keragaman strategi kelembagaan.

Brunei memperlihatkan konfigurasi ketiga yang lebih berhati-hati. Identitas keagamaan negara menjadi dasar utama bagi arah transformasi PTKI dan berfungsi sebagai kerangka penuntun bagi kebijakan pendidikan tinggi Islam. Kebijakan pemerintah Brunei menurut (Haidi & Hamdan, 2023) menunjukkan bahwa ”Komitmen terhadap multikulturalisme tidak dilepaskan dari kerangka negara-Bangsa. Pluralitas tidak ditempatkan sebagai pendorong perubahan struktural, tetapi sebagai kondisi sosial yang perlu diselaraskan dengan identitas religius yang dominan.”[28] Pendekatan ini menghasilkan kesinambungan kelembagaan yang kuat, tetapi sekaligus mempersempit ruang bagi inovasi kurikulum dan tata kelola yang lebih terbuka terhadap keragaman sosial. Dengan kata lain, transformasi PTKI di Brunei bergerak dalam orbit konservatif yang memprioritaskan kontinuitas ketimbang reformasi substantif.

Analisis lintas-kasus memperlihatkan setidaknya tiga pola utama. *Pertama*, masing-masing negara menafsirkan multikulturalisme dalam kerangka konseptual yang berbeda: (Abduh et al., 2020), ”Indonesia menganggapnya sebagai instrumen modernisasi.”[29] (Solihin et al., 2019), selanjutnya. ”Malaysia sebagai kompetensi kewargaan global; sementara Brunei menempatkannya sebagai nilai normatif yang harus diselaraskan dengan identitas nasional.”[30] *Kedua*, strategi tata kelola menjadi faktor penentu kedalaman perubahan sebagaimana dijelaskan oleh (Agus Zaenul Fitri et al., 2020) bahwa, ”Struktur desentralisasi Indonesia memungkinkan variasi

[27] Bujang, S., Selamat, A., Krejcar, O., Marešová, P., & Nguyen, N. (2020). Digital Learning Demand for Future Education 4.0 - Case Studies at Malaysia Education Institutions. *Informatics*, 7, 13. https://doi.org/10.3390/informatics7020013

[28] Haidi, H., & Hamdan, M. (2022). Analysis of the home-based online teaching and learning policy during the COVID-19 second wave in Brunei: a joint parent/teacher perception. *Asia Pacific Education Review*, 1 - 16. https://doi.org/10.1007/s12564-022-09798-x

[29] Abduh, A., Basri, M., Shafa, S., Patak, A., & Rosmaladewi, R. (2020). Voices of English Department Students on Multicultural Values in an Indonesian Islamic Higher Education. *International Journal of Language Education*. https://doi.org/10.26858/ijole.v4i3.17829 https://ojs.unm.ac.id/ijole/article/view/17829/pdf

[30] Solihin, M., Jalaludin, J., Novita, M., & Ismail, M. (2019). SWOT Analysis on The Transformation of Islamic Higher Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 159-174. https://doi.org/10.15575/jpi.v5i2.3107

institusional yang luas."[31] sedangkan menurut (Bush & Ng, 2019), "Malaysia dan Brunei, dengan kebijakan yang lebih terpusat, menghasilkan konsistensi yang kuat sekaligus homogenitas yang lebih tinggi."[32] *Ketiga*, keberhasilan transformasi ternyata tidak hanya bertumpu pada kerangka kebijakan, menurut (Rusdiana & Nasihudin, 2018) "Melainkan juga pada kapasitas institusional untuk mengintegrasikan mandat keilmuan Islam dengan realitas sosial yang semakin plural."[33]

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memetakan perbedaan kebijakan antarnegara, tetapi juga menunjukkan bahwa multikulturalisme dapat berfungsi sebagai lensa analitis untuk membaca ulang arah pembaruan sistem PTKI. Temuan-temuan ini pada akhirnya menegaskan bahwa transformasi PTKI bersifat *path-dependent*—menyusuri jejak sejarah kebijakan, konfigurasi kelembagaan, serta orientasi politik masing-masing negara—dan berlangsung melalui proses negosiasi berkelanjutan antara nilai, struktur, dan konteks lokal.

Pembahasan

Pembacaan komparatif terhadap transformasi PTKI di Indonesia, Malaysia, dan Brunei menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak pernah hadir sebagai gagasan yang netral. Ia selalu beroperasi melalui logika negara dan tertanam dalam konfigurasi kelembagaan yang membentuk cara setiap sistem pendidikan tinggi Islam menafsirkan serta mengimplementasikan konsep tersebut. Pada titik ini menurut (Kafid & Rohman, 2018) bahwa, "Transformasi PTKI bukan semata respons administratif atas kebijakan negara; ia merupakan proses epistemik yang berkelindan dengan upaya menentukan pengetahuan yang sah mengenai Islam, masyarakat, dan pluralitas."[34]

Dalam konteks Indonesia, menurut (Jayadi et al., 2022) bahwa, "Agenda reformasi PTKI serta modernisasi tata kelola memperlihatkan bagaimana multikulturalisme berfungsi sebagai pemicu perubahan struktural."[35] Meskipun begitu, ketimpangan kapasitas antar institusi menunjukkan bahwa aspirasi besar tidak selalu selaras dengan kesiapan operasional. Temuan ini menguatkan literatur mengenai *policy–capacity gap*, yaitu situasi ketika kebijakan progresif tidak sejalan dengan kemampuan institusi untuk mengaktualisasikannya. Dengan demikian, (Jayadi et al., 2022), "Heterogenitas transformasi PTKI di Indonesia bukan sekadar karena perbedaan derajat komitmen

[31] Fitri, A., Nasukah, B., & Tayeb, A. (2020). Strategic Planning Model of Islamic Religious Higher Education (PTKI) in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 287-308. https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.287-308
[32] Bush, T., & Ng, A. (2019). Distributed leadership and the Malaysia Education Blueprint. *Journal of Educational Administration*. https://doi.org/10.1108/jea-11-2018-0206
[33] Rusdiana, A., Bandung, S., & Rata-Rata, K. (2018). The Implementation of National Standard-Based Curriculum in Private Islamic Higher Education: Leadership Impact. *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.15575/jpi.v4i1.2116
[34] Kafid, N., & Rohman, N. (2018). Islamic Higher Education and Religious Transformation of the Muslim Community's Surrounding. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4, 27-38. https://doi.org/10.15575/jpi.v4i1.2069
[35] Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828

kebijakan, melainkan karena institusi bergerak dalam ekosistem yang kompleks."[36] — birokrasi yang berlapis, sumber daya yang variatif, dan keragaman sosial yang luas.

Malaysia memperlihatkan pola yang berbeda. Sentralisasi kebijakan memungkinkan implementasi nilai multikultural berlangsung stabil dan relatif seragam, tetapi stabilitas ini sekaligus membatasi ruang bagi inovasi radikal. Fenomena ini sejalan dengan kajian mengenai *highly centralized governance*, yang menunjukkan bahwa efektivitas operasional sering menekan peluang interpretasi alternatif. Dalam ranah PTKI, (Mas'ud et al., 2019) "Hal tersebut tampak pada kurikulum terstandar dan program interkultural yang memfokuskan pembentukan kompetensi kewargaan."[37] namun tidak selalu mendorong eksperimen akademik yang biasanya menjadi medium pembaruan dalam studi Islam.

Brunei menghadirkan dinamika yang lebih halus. Multikulturalisme ditempatkan dalam kerangka identitas nasional yang sangat terstruktur, sehingga pluralitas diperlakukan sebagai nilai yang harus diselaraskan dengan narasi keagamaan negara. Pendekatan ini menghasilkan transformasi yang stabil tetapi tidak disruptif. Temuan tersebut sejalan dengan literatur *conservative reform*, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Arphattananon, 2018) bahwa, "Reformasi yang bergerak menjaga kontinuitas identitas alih-alih merombak paradigma kelembagaan. Konsekuensinya, PTKI di Brunei lebih lambat mengadopsi pendekatan multikultural berbasis dialog atau interaksi, meskipun tetap konsisten mempertahankan dasar ideologis pendidikan tinggi Islam.[38]

Tabel Analisis Komaprasi Strategi Pengembangan PTKIS

Aspek Analisis	Indonesia	Malaysia	Brunei
Orientasi Multikulturalisme	Diposisikan sebagai *motor modernisasi*— mendorong integrasi ilmu, reformasi kurikulum, dan pembaruan keilmuan Islam.	Diartikulasikan sebagai *kompetensi kewargaan* yang mendukung agenda *nation-building* melalui kebijakan terpusat.	Ditempatkan sebagai *nilai normatif* yang selaras dengan identitas Melayu Islam Beraja (MIB).
Tata Kelola	Cenderung *desentralistis*:	*Sangat tersentralisasi*:	*Terpusat dan ideologis*: stabilitas

[36] Fitri, A., Nasukah, B., & Tayeb, A. (2020). Strategic Planning Model of Islamic Religious Higher Education (PTKI) in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 287-308. https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.287-308

[37] Mas'ud, A., Fuad, A., & Zaini, A. (2019). EVOLUTION AND ORIENTATION OF ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA AND MALAYSIA. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*. https://doi.org/10.15642/jiis.2019.13.1.21-49

[38] Arphattananon, T. (2018). Multicultural education in Thailand. *Intercultural Education*, 29, 149 - 162. https://doi.org/10.1080/14675986.2018.1430020

Aspek Analisis	Indonesia	Malaysia	Brunei
	memberi ruang inovasi, namun kesenjangan kapasitas membuat kualitas tidak merata.	implementasi konsisten, stabil, tetapi kurang memberi ruang eksperimen akademik.	tinggi, perubahan bergerak dalam batasan identitas negara.
Dinamika Transformasi	Berjalan cepat tetapi tidak seragam; dipengaruhi kapasitas institusi dan kompleksitas birokrasi.	Perubahan lebih linear dan terkontrol; penyeragaman memperkuat efisiensi.	Transformasi bersifat gradual dan konservatif; lebih menjaga kesinambungan daripada inovasi.
Peran Negara	Negara bertindak sebagai fasilitator—memberi arah umum, tetapi memberi keleluasaan institusi.	Negara menjadi pengarah utama—standar, pendanaan, dan kurikulum sangat diatur pusat.	Negara berfungsi sebagai penjaga identitas—kebijakan diarahkan untuk konsistensi ideologis.
Tantangan Utama	*Policy–capacity gap*: kebijakan maju, kapasitas tidak selalu mengikuti.	Keterbatasan fleksibilitas untuk inovasi kontekstual.	Ruang dialog multikultural relatif sempit karena orientasi yang sangat normatif.
Peluang Transformasi	Penguatan tata kelola dan kepemimpinan akademik dapat memperkecil kesenjangan kualitas.	Membuka ruang inovasi kecil tetapi strategis dapat memperkaya pendekatan multikultural.	Pembaruan berbasis dialog lintas budaya dapat memperluas makna multikulturalisme tanpa menggoyahkan dasar ideologis.

Jika ketiga konteks ini disandingkan, tampak jelas sebagaimana dikemukakan oleh (Muliadi et al., 2025) bahwa, "Arah transformasi PTKI ditentukan oleh hubungan antara

nilai multikulturalisme, desain kebijakan, dan kapasitas kelembagaan."[39] Temuan ini memperkaya argumen klasik dalam studi transformasi kelembagaan bahwa perubahan pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh negosiasi terus-menerus antara struktur dan agensi. Pada akhirnya, multikulturalisme menjadi arena epistemik tempat negara, institusi, dan masyarakat merundingkan kembali batas pengetahuan keagamaan dan kewargaan.

Dari sudut teori kebijakan, penelitian ini memperlihatkan tiga modus utama kerja multikulturalisme: Konteks Indonesia menurut (Suroyo et al., 2023), "Sebagai instrumen modernisasi."[40], sedangkan di Malaysia menurut (Hoon, 2017) sebagai "Kompetensi kewargaan dan di Brunei sebagai nilai normatif negara-bangsa.."[41], Fleksibilitas konsep ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Ia memungkinkan adaptasi sesuai konteks, tetapi juga membuka risiko penyederhanaan yang mengabaikan pengalaman multikultural yang sebenarnya dihadapi mahasiswa dan dosen.

Pada cakupan yang lebih luas, dinamika di Asia Tenggara menegaskan bahwa transformasi PTKI tidak dapat dilepaskan dari geopolitik keilmuan Islam kontemporer. Globalisasi pendidikan tinggi, meningkatnya mobilitas akademik, dan kebutuhan akan kompetensi lintas budaya mendorong PTKI untuk merundingkan kembali posisi epistemiknya. Di sini, multikulturalisme berfungsi sebagai bahasa yang menjembatani tuntutan global dengan tradisi lokal, sekaligus menjadi medan penentu arah masa depan pendidikan tinggi Islam.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa transformasi PTKI merupakan proses epistemik dan politis yang kompleks. Memahami dinamika tersebut penting bukan hanya bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap keragaman konteks, tetapi juga bagi upaya memperkuat posisi PTKI dalam lanskap pendidikan tinggi global yang terus berubah.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Transformasi PTKI di Indonesia, Malaysia, dan Brunei memperlihatkan bahwa multikulturalisme tidak berhenti sebagai slogan kebijakan, melainkan bekerja sebagai prinsip epistemik yang membentuk cara institusi memaknai hubungan antara Islam, masyarakat, dan pluralitas. Penelitian ini menegaskan bahwa tidak ada satu pola transformasi yang sepenuhnya dapat digeneralisasi; setiap negara mengikuti lintasan yang ditentukan oleh sejarahnya sendiri, desain kebijakan negara, serta kapasitas

[39] Muliadi, M., Syamsidar, S., & Islam, N. (2025). Religious Moderation by Design: A Comparative Sociological Da'wah Study in Indonesian Higher Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1778

[40] S., Putra, B., , P., & Ibrahim, B. (2023). DEVELOPMENT OF MULTICULTURALISM ON ETHNIC AND RELEGION IN INDONESIA. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*. https://doi.org/10.36526/santhet.v7i1.2716

[41] Hoon, C. (2017). Putting Religion into Multiculturalism: Conceptualising Religious Multiculturalism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 41, 476 - 493. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334761

kelembagaan yang tidak pernah benar-benar seragam. Indonesia, misalnya, menjadikan multikulturalisme sebagai pendorong modernisasi sehingga menghasilkan diferensiasi kelembagaan yang luas dan dinamis. Malaysia memilih menginternalisasikannya sebagai kompetensi kewargaan melalui kebijakan pusat yang relatif konsisten. Brunei, dengan kerangka ideologis yang lebih terpusat, mempertahankan multikulturalisme sebagai nilai normatif yang dijalin erat dengan identitas nasional.

Perbandingan tiga konteks tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi PTKI tidak ditentukan semata oleh besarnya skala kebijakan, tetapi oleh kemampuan institusi mengintegrasikan mandat keilmuan Islam dengan realitas sosial yang kian plural. Di sini terlihat bahwa multikulturalisme tidak berfungsi sebagai konsep yang tunggal dan tertutup, tetapi sebagai lensa analitis yang memungkinkan pembacaan ulang terhadap batas-batas pengetahuan keagamaan, kewargaan, serta tata kelola pendidikan tinggi. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai cara multikulturalisme mengarahkan, membingkai, namun sekaligus membuka ruang-ruang kemungkinan baru bagi transformasi PTKI di Asia Tenggara.

Saran

Temuan penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pimpinan PTKI. Indonesia perlu memberi perhatian serius pada ketimpangan kapasitas antar-PTKI melalui perbaikan tata kelola, skema pendanaan yang lebih berbasis kebutuhan, serta penguatan kepemimpinan akademik yang peka terhadap pluralitas. Tanpa upaya ini, agenda modernisasi akan terus terhambat oleh kesenjangan internal yang telah berlangsung lama. Malaysia, di sisi lain, memperoleh keuntungan dari konsistensi kebijakan, namun tetap perlu menyediakan ruang kelembagaan yang lebih lentur agar inovasi berbasis konteks dapat tumbuh. Ruang eksperimentasi kecil tetapi strategis—baik dalam desain kurikulum maupun model pembelajaran—dapat memperkaya pendekatan multikultural yang selama ini relatif terstandardisasi. Sementara itu, Brunei memiliki peluang untuk memperluas pemaknaan multikulturalisme tanpa melepaskan dasar ideologis pendidikan nasional. Inisiatif berbasis dialog antarbudaya, meski cakupannya terbatas, dapat memperkuat kesiapan PTKI menghadapi dinamika pluralitas regional.

Pada tingkat kawasan, kolaborasi antar-PTKI Asia Tenggara menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperdalam pendekatan multikultural. Pertukaran akademik, riset kolaboratif, serta program lintas-kurikulum berpotensi menjadi wahana untuk menguji model transformasi yang lebih adaptif terhadap tantangan global. Pada akhirnya, agar transformasi PTKI tetap relevan, diperlukan kepekaan epistemik: kesadaran bahwa pluralitas bukan hanya kondisi sosial yang harus dikelola, tetapi sumber pembaruan intelektual yang memungkinkan pendidikan tinggi Islam berkontribusi lebih signifikan dalam lanskap global yang terus bergerak.

Daftar Pustaka

Abduh, A., Basri, M., Shafa, S., Patak, A., & Rosmaladewi, R. (2020). Voices of English Department Students on Multicultural Values in an Indonesian Islamic Higher Education. *International Journal of Language Education*. https://doi.org/10.26858/ijole.v4i3.17829 https://ojs.unm.ac.id/ijole/article/view/17829/pdf

Ahid, N., & Chamid, N. (2021). Implementation of Indonesian National Qualification Framework Based Curriculum in Higher Islamic Education. *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.15575/jpi.v7i1.12425

Ahmad, A., Yee, K., & Farley, A. (2020). Exploring the Rationale of Performance Based Funding for Malaysian Public Universities. *Journal of Education and e-Learning Research*. https://doi.org/10.20448/journal.509.2020.71.15.21

Arphattananon, T. (2018). Multicultural education in Thailand. *Intercultural Education*, 29, 149 - 162. https://doi.org/10.1080/14675986.2018.1430020

Arifin, Siful. "Model integrasi ilmu umum dan ilmu agama di PTAIN." *JURNAL AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 1.01 (2017).

Bujang, S., Selamat, A., Krejcar, O., Marešová, P., & Nguyen, N. (2020). Digital Learning Demand for Future Education 4.0 - Case Studies at Malaysia Education Institutions. *Informatics*, 7, 13. https://doi.org/10.3390/informatics7020013

Bush, T., & Ng, A. (2019). Distributed leadership and the Malaysia Education Blueprint. *Journal of Educational Administration*. https://doi.org/10.1108/jea-11-2018-0206

Dhont, F. (2016). Islamic Higher Education in the ASEAN Region: From Opportunities and Challenges. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 379-392. https://doi.org/10.15575/jpi.v2i3.865

Dobbins, M., & Knill, C. (2017). Higher education governance in France, Germany, and Italy: Change and variation in the impact of transnational soft governance. *Policy and Society*, 36, 67 - 88. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1278868

Fitri, A., Nafis, M., & Indarti, L. (2020). Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Transdisciplinary (MIT) Learning Approach and Strategy Based on Indonesian National Qualification Framework (KKNI) Curriculum. *Ulumuna*. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i1.375

Fitri, A., Nasukah, B., & Tayeb, A. (2020). Strategic Planning Model of Islamic Religious Higher Education (PTKI) in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 287-308. https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.287-308

Giesenbauer, B., & Müller-Christ, G. (2020). University 4.0: Promoting the Transformation of Higher Education Institutions toward Sustainable Development. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su12083371

H., Niam, K., , M., & Lukens-Bull, R. (2025). Contemporary Changes in Islamic Higher Education in Indonesia: Dynamic Encounter Between Modernisation and Tradition. *Journal of Al-Tamaddun*. https://doi.org/10.22452/jat.vol20no1.14

Haidi, H., & Hamdan, M. (2022). Analysis of the home-based online teaching and learning policy during the COVID-19 second wave in Brunei: a joint parent/teacher perception. *Asia Pacific Education Review*, 1 - 16. https://doi.org/10.1007/s12564-022-09798-x

Hoon, C. (2017). Putting Religion into Multiculturalism: Conceptualising Religious Multiculturalism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 41, 476 - 493. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334761

Ishak, M. (2020). Managing Ethnicity and Constructing the Bangsa Malaysia (A United Malaysian Nation)*. . https://doi.org/10.32890/mmj.6.1-2.2002.8599

Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828

Kafid, N., & Rohman, N. (2018). Islamic Higher Education and Religious Transformation of the Muslim Community's Surrounding. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4, 27-38. https://doi.org/10.15575/jpi.v4i1.2069

Khozin, K., & Umiarso, U. (2019). The Philosophy and Methodology of Islam-Science Integration: Unravelling the Transformation of Indonesian Islamic Higher Institutions. *Ulumuna*. https://doi.org/10.20414/ujis.v23i1.359

Kirkpatrick, A., & Liddicoat, A. (2017). Language education policy and practice in East and Southeast Asia. *Language Teaching*, 50, 155 - 188. https://doi.org/10.1017/s0261444817000027

Kultsum, U., Parinduri, M., & Karim, A. (2021). Comparative studies between public and private Islamic schools in the era of globalization. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i1.22182

Mas'ud, A., Fuad, A., & Zaini, A. (2019). EVOLUTION AND ORIENTATION OF ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA AND MALAYSIA. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*. https://doi.org/10.15642/jiis.2019.13.1.21-49

Muliadi, M., Syamsidar, S., & Islam, N. (2025). Religious Moderation by Design: A Comparative Sociological Da'wah Study in Indonesian Higher Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1778

Musayyidi, Musayyidi, and Siful Arifin. "Manajemen pendidikan Islam multikultural di tengah masyarakat plural." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9.2 (2021): 291-306. https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.193

Müller, D. (2018). Hybrid Pathways to Orthodoxy in Brunei Darussalam: Bureaucratised Exorcism, Scientisation and the Mainstreaming of Deviant-Declared Practices. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37, 141 - 183. https://doi.org/10.1177/186810341803700106

Müller, D. (2022). Beyond the Sharia State: Public Celebrations and Everyday State-Making in the Malay Islamic Monarchy of Brunei Darussalam. *Asian Journal of Law and Society*, 9, 418 - 439. https://doi.org/10.1017/als.2022.33

Noor, A., Dorasamy, M., & Raman, M. (2023). The Influence of Commitment to Change and Change-Related Behaviour among Academics of Malaysian-Islamic Higher Learning Institutions. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su151914250

Nuryadi, M., , Z., & , S. (2020). The Pattern of the Teaching of Multiculturalism-Based Civics Education: A Case Study at Higher Education Institutions. *European journal of educational research*, 9, 799-807. https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.2.799

Paul-Binyamin, I., & Reingold, R. (2014). Multiculturalism in teacher education institutes – The relationship between formulated official policies and grassroots initiatives. *Teaching and Teacher Education*, 42, 47-57. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.04.008

Rusdiana, A., Bandung, S., & Rata-Rata, K. (2018). The Implementation of National Standard-Based Curriculum in Private Islamic Higher Education: Leadership Impact. *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.15575/jpi.v4i1.2116

S., Arifullah, M., & Hadi, M. (2025). Implementing Multicultural Education in Indonesian State Islamic Universities: Case Studies of UIN Sunan Kalijaga and UIN Sulthan Thaha Saifuddin. *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.14421/jpi.2025.141.1-14

S., Putra, B., , P., & Ibrahim, B. (2023). DEVELOPMENT OF MULTICULTURALISM ON ETHNIC AND RELEGION IN INDONESIA. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*. https://doi.org/10.36526/santhet.v7i1.2716

Salam, A., & Hussin, N. (2025). ISLAMIZATION OF EDUCATION IN MALAYSIA. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v11i1.396

Solihin, M., Jalaludin, J., Novita, M., & Ismail, M. (2019). SWOT Analysis on The Transformation of Islamic Higher Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 159-174. https://doi.org/10.15575/jpi.v5i2.3107

Susilawati, S., Supriyatno, T., Yasin, A., Anshari, M., Chakim, A., Haniah, Z., & Putri, C. (2025). Design of Curriculum Internationalization Based on Key Performance Indicators of Higher Education. *International Journal of Religion*. https://doi.org/10.61707/adj9f326

Thoriquttyas, T., Nasih, A., Sultoni, A., & Yani, A. (2021). Malay, Islam, Beraja and The [Islamic] Educational Philosophy in Brunei Darussalam. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.21043/edukasia.v16i2.11834

Torres, C., & Tarozzi, M. (2020). Multiculturalism in the world system: towards a social justice model of inter/multicultural education. *Globalisation, Societies and Education*, 18, 18 - 7. https://doi.org/10.1080/14767724.2019.1690729